

SKRIPSI

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN
BENCANA DI KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diusulkan oleh

HERLIANA

Nomor Stambuk : 105610515714



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KERJSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKATA DALAM MANAJEMEN
BENCANA DI KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

HERLIANA

Nomor Stambuk : 105610515714

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam
Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu
Kabupaten Enrekang

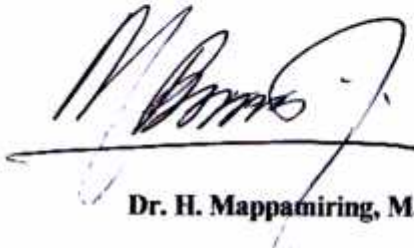
Nama Mahasiswa : Herliana

Nomor Stambuk : 105610515714

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

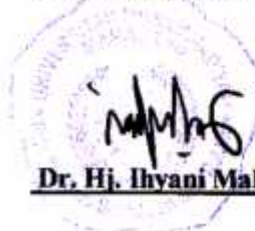
Pembimbing II



Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH


Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



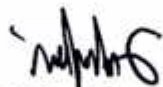
Nasrulhaq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0007/FSP/A.1-VIII/II/39/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu 09 Februari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

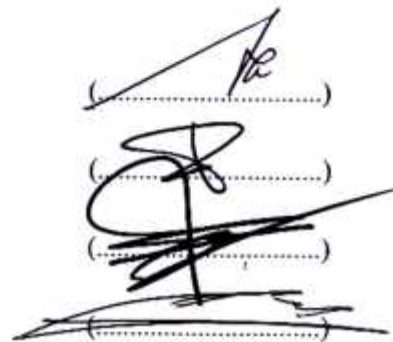
Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENGUJI

1. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH (Ketua)
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Herliana

Nomor stambuk : 105610515714

Program : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2019

Herliana

ABSTRAK

HERLIANA, 2018. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang (Dibimbing oleh Mappamiring dan Nuraeni Aksa).

Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif . Informan terdiri dari tujuh orang antara lain : Kepala Pelaksana dan Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Buntu Batu, Kepala Desa Ledan dan masyarakat korban bencana. Data dikumpulkan dengan melakukan: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu yaitu : (1) Tanggungjawab secara bersama-sama dalam menanggulangi suatu bencana tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau pemerintah saja, masyarakat juga harus ikut andil dalam penanggulangan bencana. (2) Saling berkontribusi dalam penanggulangan bencana dengan mengerahkan semua kekuatan yang ada baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. (3) Mengarahkan kemampuan secara maksimal yaitu Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahannya perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan. Faktor pendukung Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu Adanya program yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat, Pemberdayaan sumber daya Manusia (SDM). Faktor penghambat yaitu faktor geologis, kurangnya anggaran dana.

Kata kunci : kerjasama pemerintah, masyarakat, manajemen, bencana.

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Alhamdulillah RabbilAalamin, sudah sepatutnya penulis ucapkan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT. Dia-lah Allah yang Maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Dia-lah Allah yang Maha penyayang karena dengan rasa kasih sayang-Nyalah sehingga penulis skripsi yang berjudul: **“Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”** dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya doa dan bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan simpuh buat kedua orang tua tercinta (Ali D dan Sariana). Terimakasih atas segala doa dan bimbingannya, kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanannya sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa penulis kerjakan dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan selalu dalam lindungan-Nya. Terimakasih yang tulus dan mendalam khususnya kepada saudara kandung tercinta, Jainal, Muliani, Muhardi, Muh. Fadli, Husnul Khatimah, Muh. Ilman juga kepada kakak ipar Sri rahyuni dan ponakan tersayang Dzikra Hufairah serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan bantuan berupa moral maupun material selama penulisan menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan

terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada ibu bapak pembimbing. Bapak Dr.H Mappamiring, M.Si sebagai pembimbing I, dan Ibu Hj.Andi Nuraeni Aqsa,SH.MM sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan yang berharga sejak dari awal sampai selesai skripsi ini. Pada kesempatan ini pla tak lupa mengucapkan terimakasih ysnng setinggi-tingginya kepada seua pihak yang telah memberikan bantuan terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Ali D Ibu Sariana serta kepada semua saudara kandung dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan semangat, dan bantuan baik berupa moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.H. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Hj.A. Nuraeni Aqsa, SH. MM selaku pembimbig II yang senantasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis meempuh pendidikan sampe tahap penyelesaian studi.

6. Para pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang dan pegawai serta staff kantor di Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014 terkhusus kelas H yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih yang tulus dan mendalam kepada sahabat terkasih Doko, Uni, Miss, Eva, Dinda, dan Azan sebagai motivator hidupku dalam yang tiada hentinya memberi semangat kepada enulis untuk tetap optimis dalam mengejar cita-cita juga member doa kepada saya.
9. Terimakasih kepada teman terbaik ku Meli kati', Novi bakri, dan Dian (PRINCES POKA) yang selalu member motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan subangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan..

Makassar, 18 Januari 2019

Herliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kerja Sama.....	7
B. Pengertian Manajemen.....	13
C. Pengertian Bencana.....	18
D. Manajemen Penanggulangan dan Pencegahan Bencana.....	23
E. Pengertian Koordinasi.....	27
F. Tipe Koordinasi.....	29
G. Kerangka Pikir	31
H. Fokus Penelitian	32
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Engrekang	58
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Informan Penelitian.....36
2. Tabel 4.2 Distribusi Penduduk.....41
3. Tabel 4.3 Jenis bencana di Kecamatan Buntu Batu48

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam selama ini kerap dilihat sebagai *forcemajore* yaitu semua hal yang berada di luar kendali manusia oleh karenanya, untuk mengurangi korban akibat bencana dibutuhkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini alangkah bagusnya telah dimiliki oleh masyarakat dengan kearifan lokal daerah setempat, karena mengetahui daerah Indonesia merupakan wilayah yang memiliki resiko terhadap bencana.

Bencana alam yang terjadi di Indonesia seakan tidak ada habis-habisnya, sehingga masyarakat Indonesia sudah sangat sering mendengar istilah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor, dan lain-lain. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan sosio-demografis, Indonesia ialah suatu wilayah dengan resiko terhadap bencana alam tinggi. Secara geografis Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berada pada empat pertemuan tektonik yaitu lempeng Benua Asia dan Benua Australia serta lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terdapat 130 gunung merapi aktif dan terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% di antaranya melewati kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor pada musim hujan (DepkesRI,2007).

Menurut Bakornas Penanggulangan Bencana (2008), resiko bencana adalah interaksi antara jarak tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya (*hazard*).

Ancaman bahaya khususnya bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari dinamika cara alami pembangunan atau pembentukan rona muka bumi baik dari tenaga dalam maupun luar, sebaliknya tingkat kepekaan (*vulnerability*) daerah dapat di kurangi dengan melaksanakan mitigasi (tindakan preventif), beserta kemampuan/ketahanan dalam menghadapi bencana (*disaster resilience*) tersebut semakin banyak sehingga bisa mengurangi dampak akibat bencana.

Semakin banyak ancaman bahaya, kerentanan dan ketidakmampuan, maka semakin tinggi pula resiko bencana yang dihadapi. Berdasarkan potensi bahaya bencana serta tingkat kerentanan yang ada, maka diperkirakan resiko bahaya yang akan terjadi di wilayah Indonesia tergolong tinggi. Dengan mengetahui resiko yang terjadi akibat bencana, pemerintah dan masyarakat harus melakukan kerjasama dan diharapkan dapat melaksanakan penanggulangan bencana (Bakornas Penanggulangan Bencana, 2008).

Penanggulangan bencana (PB) sebagai rangkaian kegiatan baik sebelum maupun saat dan sesudah terjadi bencana dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan bencana. Seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 654 Tahun 2014-2018 Tentang Pengesahan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: pencegahan, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan, tanggap darurat,

pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan pembangunan berkelanjutan yang mengurangi resiko bencana (UNDP Indonesia,2007).

Bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, hingga gunung meletus yang mengancam nusantara, ancaman lain yang berwujud pergerakan tanah pun tak dapat diabaikan. Kejadian bencana seperti tanah longsor sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang sangat tinggi. Pergerakan tanah atau yang sering disebut tanah longsor amat sangat sering terjadi setiap tahunnya. Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam seperti tanah longsor pun memang tak terlalu parah jika dibandingkan dengan catatan kerugian bencana alam lain di Indonesia. Dan akibat yang paling nyata dari bencana alam seperti tanah longsor adalah tertimbunnya desa atau sekelompok masyarakat yang hidup persis di atas atau di bawah bukit yang labil tanahnya. Namun kewaspadaan dan proses mengurangi resiko tetap harus diperhatikan dengan tujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Hutan dan pepohonan lebat sebagai pencegah utama longsor tanah tetap harus di jaga kelestariannya agar dapat mengurangi resiko terjadinya bencana. Karena pada kenyataannya, bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang tak bisa merawat dan menjaga hutan sebagai alat utama resapan air dan pengikat tanah di lereng-lereng berbukit. Ratusan nyawa yang tertimbun dalam bencana alam tanah longsor di Banjarnegara dan Pangalengan beberapa tahun silam setidaknya mampu menjadi pelajaran bagi masyarakat lain yang tinggal di jenis lokasi serupa khususnya di Pulau Jawa. Hanya butuh waktu tak cukup dari sepuluh menit untuk

menenggelamkan satu dusun dengan 300 lebih penduduk di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Serupa dengan yang terjadi di sepanjang akhir tahun 2016 sampai awal tahun 2017 lalu, data yang diperoleh di posko Pusdalops BPBD Kabupaten Enrekang. Kejadian bencana yang terjadi di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ada enam kali. Namun bencana yang paling sering terjadi adalah bencana tanah longsor. Ada enam titik longsor yang terjadi di Desa Ledan diantaranya di Dusun Dawek yang mengakibatkan satu rumah hancur total serta jalan poros menuju kecamatan mengalami kerusakan dan beberapa kebun masyarakat yang mengalami longsor parah, yang terjadi hingga 4 kali. Disusul orang tenggelam dan kebakaran rumah. Masing masing kejadian terjadi satu kali.

Seharusnya dalam hal seperti ini, pemerintah lebih berperan penting dalam melakukan penyuluhan akan pentingnya menjaga kelestarian alam sehingga masyarakat tidak seenaknya membuka lahan pertanian untuk meminimalisir terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi, mengingat Kecamatan Buntu Batu merupakan daerah pegunungan yang rawan akan terjadinya bencana tanah longsor. Namun fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan, kenyataannya pemerintah kurang memberikan sosialisasi tentang bencana alam kepada masyarakat, sehingga masyarakat melakukan pembukaan lahan pertanian baru dengan tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan, sehingga potensi terjadinya bencana lebih banyak.

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang memang sangat beresiko jika terjadi bencana mengingat letak geografisnya yang sangat rentan terjadinya

bencana. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kerjasama pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor mendukung dan faktor penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah Khazanah keilmuan pengembangann ilmu pemerintahan khususnya menyangkut Bencana Tanah longsor di Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah daerah khususnya Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang agar menjaga lingkungan dan alam dalam hal ini yakni jajaran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sekaligus tetap menjunjung loyalitas tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang aparatur pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kerjasama

Kerjasama menurut KBBI Kerjasama adalah adalah kegiatan usaha atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama. Adapun menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007:28), kerjasama mempunyai derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*.

Kerjasama (*Cooperation*) merupakan adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optional. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Baik berupa kerjasama dalam sebuah kelompok tertentu, maupun antara kelompok dengan kelompok yang lain dalam lingkungan masyarakat. (Sunarto, 2000).

Hubungan kerjasama pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam *good governance*. Dalam konteks *good governance* pemerintah di posisikan sebagai *fasilitator*, sedangkan tugas untuk pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh komponen Negara termasuk di dunia usaha dan masyarakat. Bentuk mideal realisasi yang ingin diwujudkan adalah “kersasama” antara pemerintah, masyarakat, swasta, organisasi sosial, organisasi profesi, dan LSM (Sulistiyani, 2004).

Kerjasama didefinisikan sebagai hubungan sukarela antara kelompok dengan lainnya, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang didalamnya

setuju untuk bekerjasama dalam meraih tujuan bersama, dan menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko, tanggung jawab, sumber daya, kemampuan dan keuntungan secara bersama-sama, kunci utama terlaksananya kerjasama adalah dengan menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kerjasama tersebut, Jayagiri dalam (Sulaeman, 2014).

Istilah kerjasama (*cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Adapun beberapa pandangan menurut para ahli tentang kerjasama adalah sebagai berikut dalam (Jengjit, 2014).

Menurut Rosen dalam Keban (2007) Secara teoritis, istilah kerjasama (*cooperation*) sudah sejak lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*economies of scales*). Sedangkan menurut Tangkilisan (2005:86) kerjasama yaitu semua batas kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Dan hal ini di jelaskan oleh Rosen dalam Keban (2007) bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas :

1. *Handshake Agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.

2. *Written Agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara RI (2004) kerjasama terdiri atas beberapa bentuk, yaitu: (Denny, 2013)

1. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri, misalnya pendirian perpustakaan dimana sumberdaya seperti buku-buku, dan pelayanan lainnya, dapat digunakan bersama-sama oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat public, daripada masing-masing pihak mendirikan sendiri karena lebih mahal.
2. *Joint Purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekankan biaya karena skala pembelian lebih besar.
3. *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
4. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan Bangunan, seperti pusat rekreasi, gedung rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parker, dan gedung perpustakaan.
5. *Joint Services*, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.
6. *Contract Services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, dan persampahan. Jenis pengaturan ini lebih mudah dibuat dan dihentikan, atau ditransfer kepihak yang lain.

Ada dua macam bentuk Partnership yaitu *Pertama General Partnership*. *Kedua, Limited Partnership*. Sedangkan pendapat menurut Madura (2001) mendefinisikan Kerjasama sebagai bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama, membagi laba atau rugi daripada bisnisnya, mempunyai tanggung jawab tak terbatas.

West (2002) menetapkan indikator kerjasama yaitu: Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi, dan saling berkomunikasi. Kerjasama ada beberapa faktor kerjasama yang sangat penting seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercipta tujuan yang diharapkan suatu organisasi. Kerjasama tersebut memerlukan waktu dan tahapan tertentu, agar kolaborasi ketiga pihak yang terlibat terjalin komunikasi. Kepentingan yang ada berjalan secara seimbang dan tidak ada satu kepentingan yang berada di atas kepentingan yang lain, semuanya harus berjalan sejajar sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan.

Bowo dan Andy menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama (2007) “Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya (*win-win*). Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama”.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak sepakat untuk mencapai tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Jika tujuan yang ingin dicapai berbeda maka kerjasama tidak akan tercapai.

Beberapa prinsip kerjasama yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yaitu: (Denny,2013)

- a. Partisipatif. Dalam lingkup kerjasama dengan Pemerintah Daerah, prinsip partisipatif harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya, dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan resiko.
- b. Efisiensi. Dalam melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
- c. Efektivitas. Dalam melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh.
- d. Konsensus. Dalam melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.

Agar berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007). Prinsip umum tersebut dalam prinsip *good governance* yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapabilitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh-pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

5. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

6. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

B. Pengertian Manajemen

Definisi manajemen misalnya Manullang (Atik dan Ratminto,2012) mendefinisikan manajemen sebagai “seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Sedangkan Menurut G.R Terry (Hasibuan,2009) mendefinisikan manajemen sebagai “suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

Dua definisi diatas kelihatannya berbeda, tetapi apabila dicermati pada prinsipnya adalah sama. Yang dimaksud dengan proses oleh Gibson, dkk sebenarnya adalah penerapan ilmu dan seni sebagaimana dimaksud oleh Mnullang, Sedangkan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan oleh Gibson dan kawan-kawan disebut sebagai mengordinasikan

berbagai aktivitas lain. Menurut Ricky W. Griffin (2003) Manajemen merupakan suatu yang kompleks, menantang dan menarik.

1. Fungsi-Fungsi Manajemen

a. Perencanaan

Rencana memberikan sasaran bagi organisasi dan menerapkan prosedur terbaik untuk mencapai sasaran tersebut serta memungkinkan. Langkah-langkah perencanaan adalah pemilihan tujuan organisasi, sasaran ditetapkan untuk sub unit-sub unit organisasi dan program-program ditetapkan.

b. Pengorganisasian

Manajer telah menetapkan sasaran dan mengembangkan rencana atau program untuk mencapainya, maka ia harus merancang dan mengembangkan sebuah organisasi yang dapat menjalankan itu dengan berhasil. Sasaran yang berbeda membutuhkan organisasi yang berbeda untuk mencapainya *Staffing* adalah perekrut, penempatan dan pelatihan karyawan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

c. Pengarahan

Setelah Rencana disusun, struktur organisasi telah dirancang, serta staf telah direkrut dan dilatih, maka langkah selanjutnya adalah mengatur gerakan ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi ini dikenal dengan sebutan pemimpin (*leading*), pengarah (*directing*), pemotivasian (*motivation*), penggerakan (*actuating*) dan masih banyak lagi.

d. Pengendalian

Fungsi pengendalian dari manajemen mencakup 3 (tiga) unsur utama yaitu: (1). Menetapkan standar prestasi. (2) Mengukur prestasi yang sedang berjalan dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. (3) Mengambil tindakan untuk memperbaiki prestasi yang tidak sesuai dengan standar.

2. Ciri-Ciri Manajemen

Ciri-ciri Manajemen dalam kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam manajemen, ada pembagian kerja secara jelas dan tegas
- b. Manajemen ialah suatu hal yang dapat dipelajari
- c. Dalam mencapai tujuan terdapat pernyataan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, bahan, alat, waktu, dan ruangan.
- d. Pencapaian tujuan dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten.
- e. Tujuan merupakan merupakan sasaran manajemen dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.
- f. Manajemen digunakan terhadap usaha-usaha kelompok, bukan usaha individu (perseorangan) tertentu.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen

Menurut Henry Fayol yang mengemukakan 14 prinsip manajemen antara lain sebagai berikut :

- a. Pembagian Kerja (*Division of Labour*)

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja akan berjalan efektif. Oleh Karena itu, pembagian kerja harus didasarkan dari prinsip *the right man the right place* dan bukan atas dasar

like and dislike. Pembagian kerja ini akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja seorang dalam suatu organisasi/instansi/perusahaan.

b. Wewenang dan Tanggung jawab (*Authority and Responsibility*)

Wewenang mencakup hak untuk memberi perintah dan dipatuhi, biasanya dari atasan ke bawahan. Wewenang ini harus diikuti dengan mempertanggung jawabkan kepada pihak yang memberikan perintah

c. Disiplin (*Discipline*)

Disiplin mencakup mengenai rasa hormat dan taat kepada peranan dan tujuan organisasi.

d. Kesatuan Perintah (*Art of Command*)

Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari satu alasan.

e. Kesatuan Arah (*Art of Direction*)

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana.

f. Meletakkan kepentingan Organisasi di atas kepentingan sendiri (*Subordination of Individual Interest to General Interest*)

Kepentingan Organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan. Termasuk kepentingan Individu Manager itu sendiri.

g. Balas Jasa/Pemberian Upah (*Remuneration*)

Kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan haruslah adil, baik bagi karyawan maupun dengan pemilik.

h. Sentralisasi/Pemusatan (*Centralization*)

Pemusatan adalah prinsip manajemen yang mengatakan seluruh harus bisa berpusat, harus memiliki pusat.

i. Rangkaian perintah/Hiraerarki (*Chain of Command*)

Rangkaian perintah merupakan prinsip manajemen yang mengharuskan perintah dari atas kebawah harus selalu mengambil jarak yang terdekat.

j. *Order / Ketertiban*

Prinsip manajemen ini bisa jadi adalah syarat yang utama karena pada umumnya tidak ada yang dapat bekerja pada keadaan kejang atau kacau.

k. *Equity / Keadilan*

Prinsip keadilan menurut Henry Fayol dianggap sesuatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan karyawan dengan cara mengkoordinasikan keadilan dan kebaikan para manajer di dalam memimpin para bawahan dan memicu tumbuhnyarasa tunduk kepada kekuasaan dari atasan.

l. *Stability of Tenur of Personel / Stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian*

Perputaran karyawan yang tinggi bisa menyebabkan ongkos yang tinggi dalam produksi, untuk itulah prinsip ini dijalankan.

m. *Inisiative / Prakarsa*

Inisiatif merupakan prinsip manajemen yang menyatakan bahwa seseorang kepala harus pintar dalam memberikan inisiatif.

n. *Esprit de Corps / Semangat kesatuan*

Esprit de Corps atau kesetiaan kelompok merupakan prinsip manajemen dimana setiap pegawai harus mempunyai rasa kesatuan senasib sepenaggungan yang bisa menciptakan semangat kerjasama yang lebih baik.

C. Pengertian Bencana

Bencana menurut UU No.24 tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sedangkan Heru Sri Haryanto (2001) mengemukakan bahwa bencana adalah terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat.

Menurut Departemen kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Sedangkan definisi bencana (*disaster*) menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan geologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala gejala alam berupagempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Menurut Shaluf dalam Kusumasari (2014) Bencana alama merupakan kejadian bencana akibat dari bahaya alam yang mungkin merupakan hasil dari

dalam (dibawah permukaan bumi) dari luar/ eksternal (tofografi), cuaca (meteorology/hidrologi), dan fenomena biologis. Bencana alam terjadi di luar kontrol manusia dan sering dianggap sebagai “tindakan Tuhan” atau “*act of god*”.

Bencana hasil buatan manusia adalah kejadian bencana yang merupakan hasil keputusan atas perbuatan manusia. *Internasional Federal of Red Cross dan Red Crescent Societis* (2003) melihat bahwa bencana sebagai akibat perbuatan manusia ditujukan pada kejadian yang bukan merupakan bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam jangka waktu yang panjang. Bencana buatan manusia yang secara tiba-tiba terjadi meliputi runtuhnya struktur bangunan, dan tambang yang terjadi dengan sendirinya, tanpa ada paksaan atau pengaruh dari luar. Bencana hibrida muncul dari keterkaitan antara hubungan antropogenik (buatan manusia) dan kejadian alam (*Indian Institute of disaster Manajemen, 2007*).

Contoh dari bencana hibrida adalah menyebarnya penyakit dari masyarakat yang terkena wabah kepada masyarakat yang tidak memiliki sistem kekebalan tubuh alami, hancurnya hutan, belantara yang menyebabkan erosi tanah, dan adanya polusi laut akibat dari pembuangan minyak atau produk-produk bahan kimia secara sengaja (Kusumasari, 2014).

Bencana bukanlah sebuah fenomena baru bagi semua umat manusia. Kata “bencana” telah dikenal dengan baik dan digunakan oleh manusia selama ribuan tahun. Kata “bencana” dalam bahasa Inggris (*disaster*) berasal dari bahasa latin, yaitu dari akan kata *dis* (jauh) dan *astrum* (bintang) yang berarti “jauh dari bintang” atau bermakna kejadian yang menyalahkan kemalangan konfigurasi

astropologi. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, material, atau lingkungan luas yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan harus mereka alami melalui sumber daya yang ada pada mereka. Sebab bencana lokal tidak dapat disebut sebagai bencana nasional jika satuan unit respon bencana Pemerintah Provinsi/ dan lokal/ daerah mampu mengatasi semua konsekuensinya. Namun jika pemerintah daerah tidak mampu mengatasi dan membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Di dalam situasi ketika pemerintah pusat tidak mampu mengelolah semua konsekuensi dari kejadian yang merugikan itu, maka kejadian tersebut menjadi bencana internasional yang membutuhkan intervensi secara internasional dan bantuan-bantuan lainnya. (Kkusumasari, 2014).

1. Jenis-Jenis Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

Usep Solehudin (2005), mengelompokkan bencana menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Bencana alam (*Natural Disaster*) yaitu kejadian-kejadian alami seperti banjir, genangan air, gempa bumi, gunung mmeletus, badai, kekeringan, dan lainnya.
- b. Bencana ulah manusia (*man made disaster*) yaitu kejadian-kejadian karena perbuatan manusia seperti tabrakan pesawat udara atau kendaraan, kebakaran

ledakan, gangguan listrik, gangguan komunikasi, gangguan transportasi, dan lainnya.

Menurut Paripumo (2011), bahwa sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan kedalam empat sumber ancaman, yaitu:

1. Sumber ancaman klimatologis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. Contoh: banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai, dan badai.
2. Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, tsunami dan tanah longsor.
3. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan atau dapat pula akibat-akibat proses persiapan produksi. Contoh: Kebocoran reaksi nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur.
4. Faktor manusia juga dapat merupakan salah satu sumber ancaman perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh: Konflik bersejata dan penggusuran.

Sedangkan berdasarkan cakupan wilayah yang disebabkan oleh BNPB bencana terdiri dari:

- a. Bencana lokal adalah jenis bencana yang biasanya memberikan dampak pada wilayah sekitarnya yang berdekatan. Bencana ini terjadi pada sebuah gedung atau bngunan-bangunan di sekitarnya, biasanya adalah karena faktor manusia seperti, kebakran, ledakan, terorisme, kebocoran bahan kimia dan lainnya.
- b. Bencana Regional adalah jenis bencana ini memberikan dampak atau pengaruh pada arah geografis yang cukup luas, dan biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti, badai, banjir, letusan gunung, tornado, dan lainnya.

2. Fase-Fase Bencana

Menurut Barbara Santamari (2009), ada tiga fase dalam terjadinya suatu bencana, yaitu fase *preimpact*, *fase impact*, *fase postimpact*:

- a. Fase *preimpact* merupakan *warning phase*, tahap awal dari bencana informasi didapatkan dari bahan satelit dan meteorology cuaca, seharusnya pada fase inilah segala persiapan dilakukan baik oleh pemerintah lembaga, dan warga masyarakat.
- b. Fase *impact* merupakan fase terjadinya klimaks dari bencana, inilah saat-saat dimana manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup (*survice*). Fase *impact* ini terus berlanjut hingga terjadinya kerusakan dan bantuan-bantuan darurat dilakukan.
- c. Fase *postimpact* adalah saat dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari fase darurat, juga tahap dimana masyarakat mulai berusaha kembali pada fungsi komunikasi normal.

D. Manajemen Penanggulangan Dan Pencegahan Bencana

Dalam konteks penanggulangan bencana, kegiatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat merupakan isi yang perlu segera mendapatkan respon. Ironisnya, berdasarkan pengalaman yang terjadi selamaini, konsentrasi penanganan bencana seringkali hanya terfokus ketika masa tanggap darurat (penyelamatan) saja, tetapi seringkali kurang menggarap secara baik tahap rekonstruksinya. Padahal pasca bencana merupakan masa transisi dan merupakan masa sulit bagi penduduk. Kesulitan ekonomi dipastikan akan menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh penduduk pada masa tansisi ini.

Pemerintah telah mengambil beberpa langkah penting dalam mengelola bencana yang sering terjadi di Indonesia dengan membentuk sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani situasi yang kompleks. Sebuah organisasi nasional yang terkoordinasi pertama kali dikembangkan tahun 1996. Akan tetapi, wacana mngenai manajemen bencana tingkat nasional dan daerah telah mendorong pemerintah pusat untuk menyesuaikan organisasi ini menjadi lebih akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat. Di Negara-Negara rawan bencana, memahmi hubungan antara pembangunan dan bencana sangat penting.

Kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan pertimbangan yang tepat terhadap potensi dampak encana. Dalam hal ini, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk meningkatkan pengurangan resiko bencana dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada 2007, struktur organisasi, kerangka acuan kerja atau *terms of refence*, serta peran Bakornas PB dimodifikasi dan diperkuat.

Sebuah manajer operasional baru ditunjuk untuk memimpin Sekretariat Bakornas PB. Namun karena ruang lingkup dan kompleksitas dari bencana yang terjadi pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 2007 untuk semua tahapan kegiatan bencana. Menurut Undang-Undang, Bakornas PB digantikan oleh BNPB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta Satkorlak PB dan Satlak PB digantikan oleh BPBD (Badan Peanggulangan Bencana Daerah).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bencana menyebutkan bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam atau faktor non alam merupakan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. Bencana tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga gangguan social serta kelangkaan bahan pangan. Kejadian-kejadian tersebut memerlukan respons sejumlah pihak dan bantuan dari sumber daya yang mempunyai kemampuan khusus. Bantuan terhadap bencana diutamakan untuk keselamatan manusia, tetapi juga untuk mengurangi dampak-dampak akibat bencana yang mempunyai keterkaitan langsung bagi kehidupan manusia.

Smith dan Dowell mengemukakan tujuan respon terhadap bencana berikut (Purnomo, 2010):

1. Menyelamatkan hidup
2. Mencegah bencana yang lebih luas
3. Membantu penderitaan korban

4. Menyelamatkan lingkungan
5. Menjaga property
6. Memfasilitasi pengadilan dan intervensi criminal, public, teknik, dan keperluan lain
7. Memberikan informasi pada public
8. Mempromosikan pertolongan dii dan pemulihan
9. Melakukan perbaikan menjadi normal secepatnya.

Kerusakan lingkungan semakin hari terlihat begitu jelas. Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita agar tercipta ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Langkah awal melakukan perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita baru di lingkungan nasional.

Menurut Nurjannah, dkk (2010), upaya-upaya penanggulangan bencana yaitu:

1. Mitigasi

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa di pendidikan tentang bencana alam.

2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman.

Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konfrensi

Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dan wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti:

- a. Membentuk Tim Penanggulangan Bencana
- b. Membentuk penyuluhan-penyuluhan
- c. Merelokasi korban secara bertahap

Menurut Ramli (2010), upaya-upaya pencegahan ancaman bencana alam yaitu:

1. Membuat Pos Peringatan Bencana

Salah satu upaya yang kemudian dapat di upayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak.

2. Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin

Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin.

3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup

Faktor ini telah dipertegas dalam Konfeensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana Alam, yang diselenggarakan lebih dari dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu merupakan

forum terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 50.000 peserta hadir.

E. Pengertian Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan yang kepada para bawahan oleh manager maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Ismail Solihin (2009), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih

baik dibandingkan upaya perorangan. Hasibuan (2009) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dan mencapai tujuan organisasi.

Yohanes Yahya (2006) berpendapat bahwa, koordinasi adalah proses pengintegrasian. Tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2003), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-

bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

G.R Terry dalam Hasibuan (2009) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksana untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dan menurut Manullang (2008) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar lanjut untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan dapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Manullang (2008) berpendapat bahwa, koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan beriringan dalam mencapai suatu tujuan.
2. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.

3. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit.
Buku pedoman seperti ini diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka memberikan bimbingan, konsultasi, dan pencerahan.

F. Tipe Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe organisasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik.

Menurut Hasibuan (2009), Tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

- a. Koordinasi vertical (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakuka oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugas atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertical ini secara relative mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.
- b. Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat.

G. Kerangka Pikir

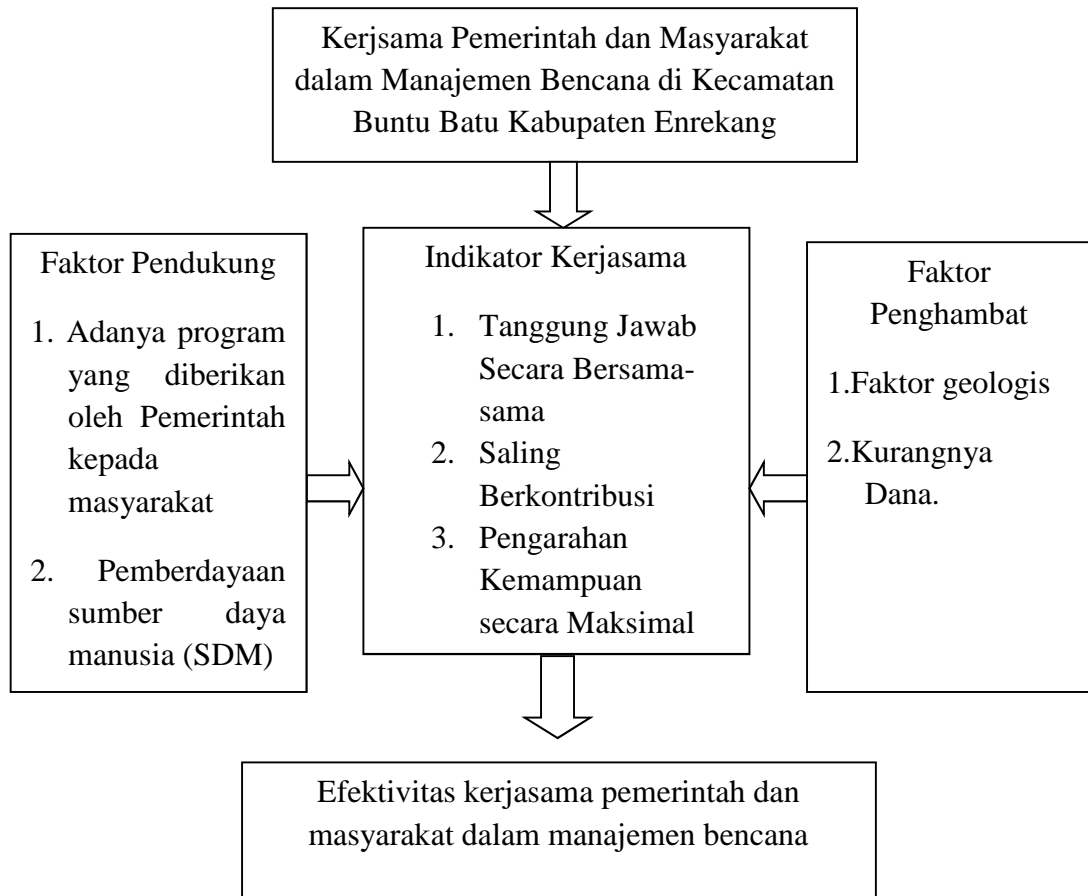
Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu daerah atau instansi tertentu. Oleh karena itu, satuan unit yang bekerja khusus dalam bidang pekerjaan tertentu seperti manajemen bencana harus bekerja dengan disiplin, efisien dan efektif. Dengan demikian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan kinerjanya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat di daerah.

Penulis dalam penelitian ini, ingin mengungkapkan sejauh mana kerjasama pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dari dampak bencana baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Tak luput dari membahas tentang perlindungan terhadap masyarakat, penulis dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai indikator kerjasama yang dikemukakan West(2002) yaitu: Tangung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi dan pengarahan kemampuan secara bersama-sama.

Adapun faktor-faktor dalam Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Faktor pendukung
2. Faktor penghambat.

Bagan kerangka pikir



H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah, Tanggung jawab secara bersama-sama antara kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Saling berkontribusi antara kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang serta Mengarahkan kemampuan secara maksimal baik itu dari pemerintah maupun masyarakat yang melakukan kerja sama.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir sebelumnya dapat dikemukakan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab secara bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan
Pemberian tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat dalam manajemen atau menanggulangi bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
2. Saling Berkontribusi
Saling memberikan kontribusi baik tenaga maupun fikiran dalam melakukan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
3. Pengarahan Kemampuan Secara Maksimal
Menggerakkan semua kemampuan yang dimiliki secara maksimal dalam melakukan kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Enrekang.
4. Efektivitas
Efektivitas yaitu menentukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal pada bulan September sampai bulan November tahun 2018 dengan alasan untuk mengetahui bagaimana kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang mengingat daerah tersebut rawan akan terjadinya bencana.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif prosedur yang digunakan adalah penekanan pada observasi dan wawancara, sebagaiandingannya adalah representasi keadaan secara sudut pandang ilmiah. Triangulasi (gabungan) merupakan teknik yang dilakukan untuk menumpulkan data, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada suatu gagasan yang umum.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif. Data penelitian yang dikumpulkan berasal dari individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.

B. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung dari Informan, dan dokumentasi berupa gambar yang diambil dilokasi penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain:

1. Data Primer yaitu data yang dihimpun secara langsung pada subjek penelitian yaitu pada petugas di dinas yang berkaitan dengan pengulangan bencana dengan cara pengamatan dan wawancara pada informan untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data Sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian untuk mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen karya ilmiah atau catatan yang ada serta jurnal dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat menambah kelengkapan data primer yang senantiasa berkaitan dengan masalah.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan individu-individu atau orang-orang yang mampu memberikan informasi permasalahan yang ingin diteliti. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive. Sedangkan pengertian purposive sendiri adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlihat

langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah:

Tabel 3.1. Informan Penelitian di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Ir. H. Beni Mansyur, MT	BM	Ketua BPBD	1
2	Rukman, S.Pd	RM	Anggota BPBD	1
3	Sabang, S.Pd, M.Pd	SB	Camat Buntu Batu	1
4	Marwan	MW	Kepala Desa Ledan	1
5	Pendi	PD	Masyarakat	3
	Ali	AL	Masyarakat	
	Yusuf	YS	Masyarakat	
Jumlah				7

Sumber: Diolah dari fokus penelitian 2018

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Observasi merupakan hal lain paling utama adalah penelitian kualitatif guna untuk memperoleh keterangan data sesuai fakta di lapangan sehubungan dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

b. Wawancara

Dalam melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan hubungan komunikasi atau berhadapan langsung antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari wawancara mengenai kerjasama

pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu tcara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi bak lisan maupun tertulis yang tidak dinyatakan dalam tujuan memudahkan peneliti dalam menyeleksi data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut dijabarkan dalam bentuk wacana sehingga lebih dimengerti, setelah itu dari wacana tersebut maka peneliti akan menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Untuk menganalisis berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan informasi adalah melalui wawancara, obsevasi langsung dan dokumentasi

2. Reduksi Data

Proses penggolongan, pengurangan serta penyederhanaan, perubahan data masih mentah diperoleh dari catatan peneliti lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilah-milah data atau informasi yang secara dan tidak sesuai dengan masalah yang ditelit.

3. Penyajian Data

Setelah data melalui proses reduksi, langkah selanjutnya data dimaksudkan agar hasil reduksi tersusun secara relevan hingga menghasilkan data yang makin mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sebaiknya harus meneliti mengenai apa arti dan hal-hal yang ditemukan dengan menuliskan peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi, (Sugiyono 2006), menjelaskan ada tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu sumber pengumpulan data dan waktu.

Ketiga triangulasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang dipergunakan untuk memeriksa kebenaran data dengan memeriksa informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber-sumber terpercaya.
2. Triangulasi Teknik/pengumpulan data merupakan suatu alat untuk menguji kebenaran data dengan cara memeriksa data dengan cara berlainan.
3. Triangulasi waktu yaitu sering mempengaruhi data yang diperoleh dengan cara wawancara pagi, siang maupun malam hari akan memberikan data yang akurat sehingga lebih dipercaya kebenarannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak

Kabupaten Enrekang terletak antara 3°14'36" LS – 119°40'53" BT. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, di sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Toraja dan Kabupaten Pinrang dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Jarak Ibukota Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km melalui Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Kondisi geografis Kecamatan Buntu Batu dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 100-1-700 m, dengan tofografi berbukit dan pegunungan serta dengan luas batas wilayah Buntu Batu 126,65 km².

2. Luas

Luas wilayah Kabupaten Enrekang 1.786,01 km² yang meliputi 12 kecamatan Selanjutnya dari 12 kecamatan terdapat 112 desa/kelurahan yaitu 17 kelurahan dan 95 desa yang masing-masing dipimpin oleh Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Adapun jumlah penduduk 190.579 jiwa.

Kecamatan Buntu Batu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Enrekang yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 2007. Kecamatan Buntu Batu dengan ketinggian dari permukaan laut 500-3478 m dengan kondisi topografi berbukit dan pegunungan serta dengan luas wilayah Kecamatan Buntu Batu 126,65 km²

dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baraka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungin sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baraka dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu. Kecamatan Buntu Batu terdiri dari delapan desa.

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di kecamatan Buntu Batu sebanyak 13.602 jiwa. Kecamatan Buntu Batu terdiri dari delapan Desa yaitu Ledan, Potokkullin, Eran Batu, Langda, Pasui, Lunjen, Buntu Mondong, Latimojon Buntu Batu Adalah 12,5 km.

Table 4.1: Distribusi penduduk Kecamatan Buntu-Batu berdasarkan Desa/Kelurahan dan jenis kelamin 2017

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Ledan	777	712	1489
Potokkullin	918	777	1695
Eran Batu	525	636	1061
Langda	631	606	1236
Pasui	1119	1168	2287
Lunjen	843	845	1689
Buntu Mondong	853	802	1655
Latimojong	1289	1201	2490
Jumlah	6.955	6647	13602

Sumber: Registrasi Penduduk Kecamatan Buntu-Batu dalam angka 2017

4. Penggunaan Lahan

Kabupaten Enrekang adalah suatu wilayah yang memiliki kualitas sumber daya alam yang cukup baik sehingga Enrekang memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam yang dilihat dari beberapa sektor seperti sector pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan, sector kehutanan, sector pertambangan dan energi, dan sektor pariwisata.

Enrekang yang terdiri dari duabelas Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Pasui dimana Kecamatan Pasui ini terdapat Desa Ledan yang sangat terpencil yang kadang susah untuk dijangkau oleh masyarakat lain. hal ini disebabkan karena infrastruktur yang tidak baik. Meskipun daerah ini sangat terpencil akan tetapi tersedia sumber daya alam yang baik dimana masyarakat di Kecamatan Buntu Batu sangat memanfaatkannya. Sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Buntu Batu adalah terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan seperti Padi, Jagung, Cabe, Kopi, Kakao, Lada, Cengkeh dan juga sayur-sayuran seperti Kol, Buncis, Sawi, dan Tomat.

5. Keadaan topografi

Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum topografi wilayah-wilayah didominasi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah kabupaten Enrekang sedangkan yang latar hanya 15,04%.

6. Kemiringan Lereng

Secara umum Kabupaten Enrekang pedataran bergelombang dengan kemiringan lereng bergelombang atau miring ($8-13^\circ$) dengan perbedaan tinggi 20-70 meter terletak pada ketinggian 41-109 meter dari permukaan laut meliputi daerah maiwa, Maroangin dan kota Enrekang , perbukitan dengan kemiringan lereng tersayat tajam atau terjal ($20-55^\circ$), dengan beda tinggi 200-500 meter terletak pada ketinggian 115-600 meter dari permukaan laut yang meliputi daerah

Cakke, Belajen, Alla, Maiwa Timur dan kota Enrekang Timur. Pengumuman denan kemiringan lereng sangat tajam/curam (55-90°) dengan beda Tinggi > 500meter terletak pada ketinggian 631-3318 meter dari permukaan laut yang meliputi Baraka, Bungin, Tallang Riaja, Karrang, Gunung Ranremario dan Gunung Nenemori.

7. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi dari Kecamatan Buntu Batu adalah:

“Terwujudnya pelayanan prima, dan koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang aman dan sejahtera periode 2014-2018”

Visi tersebut mengandung makna:

- 1. Terwujudnya pelayanan prima** mempunyai arti bahwa Kecamatan Buntu Batu dalam menjalankan tugas dalam roda pembangunan selalu memberikan pelayanan tanpa memerhatikan status sosial masyarakat dan senantiasa memiliki keyakinan, prinsip dan perilaku yang bermartabat terhadap sesama yang mampu menciptakan keadaan masyarakat lebih baik, sehingga merupakan

modal besar pembangunan dalam rangka memperkuat tatanan kehidupan masyarakat.

2. Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

memiliki makna bahwa kantor Kecamatan Buntu Batu mampu mengaktualisasi peran dan fungsinya secara optimal baik dalam hal koordinasi dengan SKPD, masyarakat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa mengandung unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Menuju Masyarakat Yang Aman, mengandung makna keadaan yang lebih

kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana.

4. Sejahtera, dimaknai keadaan dimana terjadi peningkatan kualitas hidup

masyarakat yang ditandai dengan IPM, peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, serta terpenuhi dan tercukupi kebutuhan hidup masyarakat, serta terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara layak.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran program-

program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Misi dari Kecamatan Buntu Batu adalah:

1. Menciptakan aparatur Pemerintah Kecamatan dan desa yang memiliki SDM yang tinggi;
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat dan pengkordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kecamatan Buntu Batu;
3. Menciptakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Buntu Batu;
5. Menyelenggarakan koordiansi dan pembinaan fasilitas kemasyarakatan;

8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Buntu Batu menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Kecamatan dan Desa.
- b. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan berkualitas kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

e. Meningkatnya perencanaan pembangunan Kecamatan yang sinkron dan bersinergi serta berdayaguna dan berhasilguna.

f. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Buntu Batu

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Informan

Pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan informan yang dihasilkan setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dibahas secara berurut. Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan antara lain: Ketua Umum dan Staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang, Camat Kecamatan Buntu Batu, Kepala Desa Ledan serta Masyarakat yang terkena dampak bencana.

Dilanjutkan penulis akan membahas bagaimana Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini yang menjadi informan terdiri dari tujuh prang diantaranya adalah:

- 1) BM adalah seorang kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang, Pendidikan terakhir adalah S2 Teknik. BM juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Enrekang.

- 2) RM adalah salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang, jabatan sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Kesiapsiagaan. Pendidikan terakhir adalah S1 keguruan. SM juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Enrekang.
- 3) SB adalah Camat Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Pendidikan terakhir adalah S2. SB juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Enrekang.
- 4) MR adalah Kepala Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Pendidikan terakhir adalah SMA/Sederajat menjabat sebagai kepala desa selama 6 tahun.
- 5) PD adalah masyarakat desa Ledan yang menjadi korban dari bencana (longsor) yang pernah terjadi Dusun Uru Desa Ledan.
- 6) YS adalah masyarakat desa Tunga yang menjadi korban bencana (Longsor).
- 7) AL adalah masyarakat desa Ledan Dusun Uru yang menjadi korban bencana Longsor.

2. Jenis bencana yang pernah terjadi di Kecamatan Buntu Batu Tahun 2017

Tabel 4.2 data bencana di Kecamatan Buntu Batu

No	Tgl Kejadian	Desa/Kel	Jenis Bencana	Korban		
				Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal
1	01/03/2017	Ledan	Longsor	0	0	0
2	16/05/2017	Tunga	Longsor	0	0	0
3	02/06/2017	Pasui	Orang tenggelam	0	0	1
4	19/10/2017	Potokullin	Kebakaran	0	0	0
5	28/11/2017	Latimojong	Angin putung beliung	0	0	0
6	11/12/2017	Buntu Mondong	Kebakaran	0	0	0

Sumber Data: profil umum BPBD tahun 2017

3. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu

a. Tanggungjawab Secara bersama-sama

Pemerintah dan Masyarakat daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara Khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007).

Adapun tugas pokok dari BPBD yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan mengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara,
2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Menyusun, menetapkan, dan mengonfirmasikan peta rawan bencana,
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulansekalidalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
6. Mengendalikan pengumpulan barang dan penyaluran uang dan barang,
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Daerah,
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, dan
2. Pengkoordinasian pelayanan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh,
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Enrekang.

Tentu saja upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB) mesti dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam hal ini ialah pemerintah yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan landasan wawancara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Dalam menanggulangi suatu bencana tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau pemerintah saja. Untuk itu masyarakat pun memiliki andil dalam penanganan bencana, peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Masyarakat dan pemerintah harus melakukan kerjasama seperti Sosialisasi tentang penghijauan, Memberikan sanksi kepada Masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian baru, serta membuat sistem peringatan dini mengenai Bencana Alam. Dalam hal ini penanggungjawab bersama-sama yaitu pemerintah dan Masyarakat dimana peran pemerintah sangat

penting bagi penanggulangan Bencana peran pemerintah yaitu menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan atau Bantuan nasional.

Adapun masyarakat berperan serta dalam memelihara keseimbangan dengan tidak melakukan pembukaan lahan pertanian baru demi kelestarian fungsi lingkungan hidup, hal ini merupakan upaya pencegahan bencana. Bentuk bentuk kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Buntu Batu dalam manajemen bencana yaitu gotong royong membersihkan puing-puing bangunan akibat bencana longsor serta membangun beberapa jembatan darurat untuk menggantikan jembatan yang terbawa longsor. Adapun dampak dari Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu yaitu membuat jorong penahan longsor dan menanam rumput seperti rumput akar wangi karena akar dari tanaman ini memiliki kekuatan ikat yang cukup baik untuk menahan tanah bertebing. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam upaya Mitigasi, bersedia bekerjasama mewujudkan Desa tangguh Bencana. Terkait tentang kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam manajemen bencana, seperti wawancara dengan ketua BPBD sebagai berikut:

“Sebagai Kepala pelaksana saya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan peran dalam penggulangan Bencana seperti Sosialisasi tentang penghijauan, Memberikan sanksi kepada Masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian baru, serta membuat system peringatan dini mengenai Bencana Alam” (BM, 20 September 2018)

Hasil wawancara dengan ketua BPBD mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah sangat penting dalam penanggulangan Bencana.

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu masyarakat yang ada di kecamatan Buntu Batu khususnya di Desa Tungka yang mengatakan bahwa

“Iya, kami masyarakat di Dusun Belalang ini bertanggung jawab dalam hal penggulungan Bencana seperti tidak melakukan pembukaan lahan pertanian baru demi kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya penjegahan Bencana, Bekerjasama pemerintah dalam upaya Mitigasi, bersedia bekerjasama mewujudkan Desa tangguh” (YS,24 September 2018).

Selanjutnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana sudah ada yaitu sebagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi, merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Ledan dusun Uru sebagai berikut:

“Kami bersama warga lainnya melakukan kerjasama dan melaksanakan peran kami sebagai masyarakat dalam penanggulanagan bencana misalnya dengan melaksanakan apa yang telah diterapkan oleh pemerintah ”. (PD, 27 September 2018)

Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana, kerjasama pemerintah dan masyarakat itu sendiri seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan.

Terkait tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, seperti wawancara dengan Camat Buntu Batu, sebagai berikut:

“Alhamdulillah selama ini bagus, karena sudah jauh sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi pemahaman tentang kebencanaan dan pada saat terjadi bencana. Alhamdulillah masyarakat juga dengan pemerintah serentak membantu keluarga yang terkena bencana itu.” (SB, September 2018).

Dari hasil wawancara dengan Camat Buntu Batu diatas mengatakan bahwa masyarakat yang ada Kecamatan Buntu Batu telah bekerjasama dengan baik. Ini terlihat ketika terjadi bencana masyarakat bersama pemerintah bahu membahu membantu warga lain yang terkena dampak resiko bencana. Dimana bekal tersebut didapat dari hasil sosialisai pemerintah untuk mengantisipasi datangnya bencana, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat sudah tahu langkah yang akan dilakukan untuk meyelamatkan diri sampai menolong warga lain yang terkena dampak bencana.

Pernyataan Tokoh Masyarakat diatas mengungkapkan kerjasama yang dibangun antara pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian akibat banjir, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakuka n sosialisai prabencana. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsiantisipasi, merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana yaitu Legistimasi.

Wawancara dengan salah satu masyarakat terkena Bencana sebagai berikut:

“Sebagai masyarakat yang berdomisili di dusun Uru Kecamatan Buntu Batu yang dimana sering terkena Bencana longsor peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dan harus diterapkan agar Bencana longsor dapat diminimalisir” (YS, 24 September 2018).

b. Saling Berkontribusi

Berkontribusi berasal dari kata kontribusi yang artinya sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Semakin besar integritasnya semakin besar tingkat kerjasamanya, kontribusi pemerintah sangat penting bagi penanggulangan bencana, dalam hal ini kontribusi dari pihak pemerintah di Kecamatan Buntu Batu yaitu turun langsung ke lokasi kejadian untuk memantau para korban dan memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian. Pemerintah dan masyarakat saling berkontribusi dalam penanggulangan bencana baik fikiran maupun tenaga.

Adapun penurutan wawancara dengan Camat Buntu Batu sebagai berikut:

“Saya selaku Camat di Buntu Baatu berbicara mengenai kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana sudah cukup baik yaitu berupa tenaga dan fikiran seperti memberikan arahan kepada masyarakat mengenai bahaya longsor dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana di daerah Kecamatan Buntu Batu” (SB, 29 September 2018).

Dari hasil wawancara dilihat bahwa pemerintah sudah mengarahkan kemampuan berupa tenaga dan fikirannya dalam dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi yang merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana. Dari penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi bencana tanpa menunggu instruksi dari pemerintah ketika terjadi darurat sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa karena

sudah ada bekal sebelumnya. Sehingga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan tanggap darurat.

Adapun penuturan dari salah satu masyarakat di Desa Ledan yaitu:

“Saya selaku warga di Desa Ledan merasa kontribusi pemerintah terhadap penanggulangan bencana sudah cukup baik namun terkadang terlambat dalam penanganan terhadap penanggulangan bencana seperti lambatnya penyaluran makanan serta pakaian terhadap korban bencana.. (AL, 3 Oktober 2018)

Sama halnya dengan penuturan warga lain yang juga merupakan warga di Desa Ledan, yang mengatakan bahwa pemerintah terlambat mengunjungi lokasi kejadian ketika terjadi bencana di daerah mereka.

Seperti wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Ledan:

“iya memang pemerintah ikut andil dalam penanggulangan bencana, tapi mereka lambat ke tempat kejadian jika ada bencana, kami sebagai masyarakat susah jika tidak ada arahan dari pemerintah setempat. (PD,3 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa pemerintah lambat turun ke lokasi kejadian ketika terjadi bencana dan masyarakat menyayangkan hal tersebut, karena menurut sebagian masyarakat mereka tidak bisa melakukan pembenahan di lokasi kejadian bencana jika tidak ada pemerintah setempat yang berada di lokasi kejadian.

Namun hal yang berbeda dikatakan oleh Kepala Desa Ledan sebagai berikut:

“Saya selaku Kepala Desa Ledan untuk saat ini melakukan pendekatan intensif kepada tokoh masyarakat bahkan tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat yang lain untuk bersama-sama melakukan pengawasan dini khususnya di daerah yang rawan akan bencana. (MW, 4 Oktober 2018)

Dari pernyataan informan tersebut peran pemerintah juga saat ini telah melakukan pendekatan intensif kepada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pemerintah menjalin hubungan dan menyadarkan masyarakat agar mudah menjaga lingkungannya demi mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Berkaitan wawancara dengan informan di atas, wawancara dengan Camat Buntu Batu juga memberikan asumsi sebagai berikut:

“Dalam hal penanggulangan bencana alam kami selaku pemerintah Daerah Camat Buntu Batu kami melakukan pelatihan dalam wilayah yang masuk daerah rawan bencana yang diberikan oleh BPBD atau damkar.” (SB, 29 September 2018).

c. Pengarahan kemampuan secara maksimal

Pengarahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan seluruh anggota baik itu masyarakat agar dapat bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini pengarahan kemampuan secara maksimal dari pihak pemerintah di Kecamatan Buntu Batu yaitu baik dari segi fikiran dan tenaga contohnya memberikan bantuan kepada para korban bencana. Dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan. Sedangkan dari pihak masyarakat pengarahan kemampuan secara maksimal di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu ikut andil dalam membantu korban bencana yang terjadi di daerahnya dengan membantu sebisa mungkin untuk mengurangi beban para korban bencana, dan tentunya masyarakat tetap menerima petunjuk dari pemerintah setempat.

Berikut ini adalah wawancara dengan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang bidang perencanaan dan Kesiapsiagaan mengenai pengurangan lokasi bencana sebagai berikut:

“Saya yang bertugas sebagai Kabid Perencanaan dan Kesiapsiagaan mempunyai peran dalam memonitoring lokasi yang rawan bencana misalnya tanah longsor, bila musim hujan tiba sering kita terjun ke lokasi mengecek daerah mana saja yang rawan bencana dan kita arahkan kepada aparat desa setempat dan masyarakat untuk sesegera mungkin melaporkan jika ada kejadian di desa masing-masing.” (RM, 25 September 2018)

Berdasarkan keterangan salah satu anggota kabid Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan memberikan penjelasan tentang perannya dalam mengurangi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan mengarahkan semua instansi yang terkait, karena dengan hal tersebut barulah sebuah perencanaan matang dapat dibuat untuk mengurangi bencana.

Senada dengan yang disampaikan oleh Camat Buntu Batu sebagai berikut:

“Dalam mengurangi dampak bencana alam, saya selaku Camat di Kecamatan mengimbau/mengarahkan kepada seluruh Kepala Desa dan seluruh masyarakat untuk bekerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan kelestarian alam sehingga dampak bencana dapat di minimalisir.” (SB, 29 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dan pengamatan langsung oleh peneliti dapat dikatakan bahwa dalam mengurangi dampak bencana alam Camat mengimbau/mengarahkan kepada seluruh Kepala Desa dan masyarakat nya agar melakukan kerjasama untuk meminimalisir dampak bencana.

Berikut adalah wawancara dengan Kepala Desa Ledan:

“Saya selaku kepala Desa Ledan selaku pimpinan tertinggi di Desa mendapat arahan langsung dari pak Camat dan dari BPBD Kabupaten Enrekang agar kiranya memberikan arahan kepada warga saya untuk

bekerjasama/gotong royong sebelum datang bantuan dari Kecamatan atau Kabupaten.” (MW, 4 Oktober 2018)

Wawancara berikut sehubungan dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Ledan tentang yang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana. Sebagaimana wawancara dengan beberapa Masyarakat korban bencana di Desa Ledan sebagai berikut:

“Kami mengikuti arahan/imbauan dari Kepala Desa mengenai cara untuk mengurangi dampak bencana dan melaporkan sesegera mungkin misalkan ada tanda-tana tanah yang akan longsor kepada instansi yang terkait serta gotong-royong dalam kegiatan pemerintah dalam menangani bencana. (PD, 7 Oktober 2018)

Informan berikutnya juga ikut menambahkan:

“Saya selaku masyarakat selalu ikut terlibat dalam kegiatan yang dikomandoi oleh Kepala Desa, misalnya jika ada bencana saya selaku masyarakat akan ikut serta dalam membantu korban dan ikut gotong royong membantu membantu korban bencana bersama dengan msyarakat dan pemerintah setempat” (AL, 3 Oktober 2018)

Berdasarkan keterangan dua informasi masyarakat di Desa Ledan mengenai pengarahan kemampuan secara maksimal dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Dari peraturan di atas menjelaskan bahwa masyarakat telah menerima dengan baik pengetahuan dan himbuan yang disosialisasikan oleh pemerintah sehingga masyarakat mampu bekerjasama dengan baik untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah bekerja sama dengan baik oleh pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kecamatan Buntu Batu.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

1. Faktor Pendukung

Dalam menanggulangi bencana, baik yang terjadi maupun yang belum terjadi tentunya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat daerah dalam menanggulangi bencana. Adapun faktor pendukung Kerjasama pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu dalam manajemen bencana meliputi: 1. Adanya program yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat, dan 2. Pemberdayaan sumberdaya Manusia.

a. Adanya program tanggap darurat yang diberikan oleh pemerintah

Pembentukan kelompok tanggap darurat bencana ini di pelopori oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Enrekang Yang diberi nama “Kelompok Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana” dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya sebagai objek bencana. Tetapi juga ikut mencegah dan menagulangi terjadinya bencana.

Wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang mengenai faktor pendukung Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu sebagai berikut:

“Sejauh ini baik dari pemerintah, Dinas, Instansi, dan Masyarakat Enrekang sama-sama bekerja dalam menanggulangi musibah. Kemudian pemerintah juga menjalankan program tanggap darurat bencana alam”. (SM, 10Oktober 2018).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang di atas tentunya memberikan penjelasan tentang faktor pendukung kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu. Penulis dapat menyimpulkan kerjasama yang baik dapat mendukung suatu program yang dirancang oleh pihak pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, seperti yang dijelaskan oleh informan program yang dijalankan yaitu program tanggap darurat.

Wawancara dengan anggota (BPBD) Devisi Kabid Perencanaan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tentang Faktor dalam menanggulangi bencana tanah sebagai berikut:

“Faktor pendukung dalam menanggulangi bencana, misalnya tanah longsor saya bersama teman yang lainnya sebagai yang bertugas di lapangan berupaya mendampingi masyarakat dengan bersama-sama menjalankan program tanggap darurat yang diberikan oleh atasan kami, kami juga sudah memberikan beberapa tanda-tanda aka rawan bencana, khususnya dijalan poros”. (RM, 10 Oktober 2018).

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana yang belum maupun yang telah terjadi sebagai berikut:

“Saya membantu pemerintah tidak banyak, Cuma berusaha dengan menjalankan program yang pemerintah daerah berikan, di kebun kita sudah tanam rumput gaja agar pada musim hujan tidak terjadi longsor”. (YS, 11 September 2018)

Hasil wawancara dengan informan dipihak masyarakat penulis menyimpulkan bahwa kerjasama dari pihak masyarakat dalam membantu pemerintah daerah dalam manajemen bencana misalnya tanah longsor.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan melakukan penanaman tanaman di area yang rawan bencana yang dapat menahan pencegahan tanah longsor masyarakat telah berhasil membantu mengsukeskan salah satu program pemerintah yaitu penghijauan, dan dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada pihak pemerintah daerah dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dan lapisan masyarakat yang terkait dalam mengambil tindakan mengenai cara penanganan bencana secara baik yang terjadi maupun yang belum terjadi.

b. Pemberdayaan sumber daya manusia

Bentuk pemberdayaan sumber daya manusia yang dimaksud yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya bencana alam dan dampak yang akan ditimbulkan.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara penanggulangan bencana

Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dapat meningkatkan sumber daya manusia dari segi pemahaman dan pengetahuan tentang penanggulangan bencana, Pemberdayaan sumber daya manusia disini sangat penting untuk penanggulangan bencana baik sumber daya pemerintah maupun sumber daya manusia.

Wawancara berikutnya dengan Camat Buntu Batu dan beberapa anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai faktor pendukung kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen bencana sebagai berikut:

Wawancara dengan Camat Buntu Batu tentang faktor pendukung terjadinya bencana

“Yang mendukung dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Buntu Batu selama ini, kami selaku pemerintah daerah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terus berupaya menambah wawasan masyarakat tentang bahaya rawan bencana, khususnya tanah longsor, mengingat Kecamatan Buntu Batu adalah daerah yang sepenuhnya daerah pegunungan. Jadi untuk mendukung penanggulangan bencana seperti tanah longsor yang kami fokuskan adalah memperbaiki SDM.” (SB, 11 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa Camat Buntu Batu berfokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor pendukung penanggulangan bencana alam khususnya tanah longsor. Penulis menyimpulkan apabila sumberdaya manusia diperbaiki dan masing-masing mengambil peran aktif dalam manajemen bencana, hal ini bisa menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya.

Hasil wawancara dengan staf BPBD Kabupaten Enrekang:

“Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Buntu Batu, bisa dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat di Kecamatan Buntu Batu ini, semua kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki diharapkan kepada semua pemerintah maupun masyarakat bekerja sama untuk meminimalisir bencana.” (RM, 12 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hal penanggulangan bencana ini dapat dilihat bahwa kebijakan dinas penanggulangan bencana daerah telah mengarah pada suatu kebijakan agar dapat memberikan perubahan yang lebih baik dalam hal ini yang dimaksudkan ialah faktor yang menjadi penyebab bencana dapat dikurangi.

Hasil semua wawancara pada informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan adanya suatu kemampuan aparatur dari sumber daya manusia nya sendiri, yang merupakan faktor pendukung terlaksananya manajemen penanggulangan bencana di Kecamatan Buntu Batu.

2. Faktor Penghambat

Dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana baik yang terjadi maupun yang belum terjadi tentunya ad beberapa faktor yang bisa saja menjadi penghambat Adapun faktor penghambat meliputi: (a) faktor geologis (b) kurangnya dana.

a. Faktor Geologis

Berhubungan dengan faktor penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Kecamatan Buntu Batu yang hampir 100% wilayah pegunungan dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan bencana longsor yang cukup tinggi” (MW, 10 Oktober 2018)

Kemudian wawancara yang sebada juga dilanjutkan oleh Informan berikut:

“Seperti kita ketahui bahwa kondisi geografis Kabupaten Enrekang adalah pegunungan, kondisi tanah yang miring dapat memicu rentang terjadi bencana terutama longsor. Kemudia tekstur tanah yang mengandung bebatuan menyulitkan pemerintah untuk menggali dan membuat parit-parit atau saluran irigasi yang dapat memperlancar air hujan untuk segera mengalir ke induk sungai atau anak sungai terdekat.” (wawancara dengan SM 10 Oktober 2018).

Berdasarkan keterangan informan dari pihak pemerintah di Kecamatan Buntu Batu dan ketua BPBD Kabupaten Enrekang di atas tentunya memberikan

penjelasan tentang faktor penghambat dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang salah satunya ialah faktor geologis.

b. Dana

Berhubungan dengan faktor penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu yaitu:

“Terus terang kendala Pemerintah dalam menanggulangi bencana tanah longsor itu kurangnya dana untuk membeli alat fasilitas bencana alam.” (Hasil wawancara dengan SM 10 Oktober 2018).

Informan melanjutkan faktor penghambat dalam menanggulangi bencana seperti tanah longsor sebagai berikut:

“Anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk korban bencana selama ini belum sepenuhnya mencukupi, mengingat setiap tahun terutama musim penghujan sering terjadi bencana seperti tanah longsor. Dana tersebut juga tidak semata-mata hanya difokuskan kepada penanggulangan bencana tanah longsor, melainkan dana tersebut juga masih dibagi untuk keperluan bencana lainnya”. (MW, 10 Oktober 2018)

Selanjutnya wawancara dengan Camat Buntu Batu:

“memang betul, dana yang merupakan penghalang yang merupakan faktor penghambat dalam penanggulangan bencana, kurangnya dana akan berdampak kurang optimal suatu penanganan bencana di Kecamatan Buntu Batu.” (wawancara SB, 11 Oktober 2018)

Kesimpulan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu lokasi dan anggaran yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang menjadi penghambat dalam menanggulangi terjadinya resiko bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

1. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu, (a) tanggung jawab secara bersama-sama: Dalam menanggulangi suatu bencana tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau pemerintah saja. Peran pemerintah dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di kecamatan buntu batu seperti sosialisasi tentang penghijauan, pemberian sanksi kepada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian baru, sedangkan peran masyarakat yaitu berperan serta dalam perencanaan, melakukan upaya pencegahan bencana, dan bersedia bekerjasama mewujudkan desa tangguh bencana. (b) Saling berkontribusi: Dari hasil wawancara dilihat bahwa pemerintah sudah mengarahkan kemampuan berupa tenaga dan pikirannya dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi yang merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana. Dari penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi bencana. (c). Pengarahan kemampuan secara

maksimal: Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahannya perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan.

2. Faktor pendukung Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu yakni, kerjasama yang baik dapat mendukung suatu program yang dirancang oleh pihak pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, berfokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor pendukung penanggulangan bencana alam khususnya tanah longsor. Faktor penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Buntu Batu yakni (a) faktor geologis (b) kurangnya dana

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi bencana alam misalnya tanah longsor, untuk menyediakan anggaran khusus yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak akibat bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tetap bersinergi dalam melakukan penanggulangan bencana baik yang belum maupun yang telah terjadi.
3. Masyarakat harus tetap mengambil peran penting dalam menangani penanggulangan bencana. Dengan melakukan hal-hal yang dapat mencegah bencana tanah longsor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bevaola Kusumasari, 2014, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Bakornas.2008. *Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2007/2008*. Jakarta
- Bowo,Andy, 2007. *Kerjasama*.Yogyakarta: Pustaka Larasati.
- Edralin dan Whitaker.2009. *Prinsip Good Governance*. Jakarta. Bina Aksara.
- Griffin , Ricky W dan Ronald J,Ebert. 2006, *Bisnis Jilid 1 Edisi 8*.Jakarta: Jakarta.
- Griffin Ricky. 2003. *Manajemen (Edisi 7 Jilid 1)*. Ahli bahasa: Gina Gania
Jakarta: Erlangga
- Haryanto, Heru Sri, 2001.*Manajemen Penanggulangan bencana*.Jakarta: Profil Manggalla Agni.
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan,Malayu s.p.2009.*Manajemen:Dasar,Pengertian,dan Masalah Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban.2009, *Prinsip Kerjasama*.Jakarta: Rosda.
- Komadis, 2007. *Penanggulangan Bencana*. UGM.: Yayasan IDEP.
- Kufman & Rasyid. 2011. *Tugas dan Fungsi Pemerintah*, (online).
- LIPI-UNISCO-ISDR *Kajian kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*, Jakarta, 2006.
- Madura, Jeft.2007. *Pengantar Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*, Medan: Graha Indonesia.
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia (GI).
- Ndraha, Thaziduhu, 2003. *Kybernologi*.Jakarta: Rajawali.

- Nurjanna, dkk. 2010. *Manajemen Bencana*. Bandung: Afabeta
- PHO/WHO *Pan American Health Organization World Health Organization Manajemen dan Logistic: Bantuan Kemanusiaan dalam Sektor Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2007.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih.2012. *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ramli, Soehetman. 2010. *Manajemen Bencana*.Jakarta: Dian Rakyat
- Richard L. Daft. 2011. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safiie, Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Santabari Barbara,2009. *Fase-Fase Bencana dalam Penanggulangan*.Bandung: Alfabeta.
- Solihin, Ismail, 2009. *Corporate Social Responsibility From Sumber Daya Charity To Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, 2014. “*Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang*” *Trikonomika*, Vol. 13 No. 1, Hal 1-5.
- Sulisyani, Ambar T& Rosidah. 2003 *Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan Pembangunan dalam Konteks Organissi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005 *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Thomson dan Perry dalam Keban, 2007.*Enam Dimensi Strategi Administrasi: Konsep,Teori,dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pariपुरno, Eko Teguh,2008. *Manajemen Resiko Bencana Berbasis Komunitas: Alternatif dari bawah*, Jurnal Kebijakan Publik Edisi 1 Juni , Tahun 2008, Departemen dan Informatika, Jakarta.

UNDP. 2007. *United Nations Development Program:Indonesia. Retrieved 24 may 2007.*

West (2002).*Kerja Sama yang Efektif. Cetakan Kelima. Penerjemah: Srikandi Waluyo. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.*

Yohanes, Yahya. 2006, *Pengantar Manajemen.*Yogyakarta: Graha Ilmu.

UU No. 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana.* Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

UU No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah.* Undang-undang Negara Republik Indonesia.



Ket. Foto dengan Camat Buntu Batu



Ket. Foto-Foto bencana tanah longsor di Desa Ledan

RIWAYAT HIDUP



HERLIANA, dilahirkan di Kabupaten Enrekang tepatnya di Uru Desa Ledan Kecamatan BuntuBatu 18 Juni 1995. Anak kedua dari tujuh bersaudara pasangan dari Ali. D dan Sariana. Peneliti bertempat tinggal di jalan Skardan II. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SD Negeri 89 Uru

pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Baraka dan tamat pada 2011 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Baraka pada tahun 2011 dan selesai pada 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada studi Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan BuntuBatu Kabupaten Enrekang”.